

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Peperangan dan kekacauan telah lama berkecamuk di benua Afrika selama bertahun-tahun. Keganasan yang berlaku amat sukar untuk dihapuskan. Selepas kuasa-kuasa kolonial seperti Inggris, Perancis dan Belanda keluar pada tahun 1950-an dan 60-an, kebanyakan negara-negara Afrika jatuh ke dalam tangan diktator-diktator komunis atau pun fasis. Afrika terseret dalam kancuh perang dan pertikaian antarsuku dan antar etnik yang paling parah dan sulit dicarikan solusi damainya. Korban konflik dan perang yang masih terus berkecamuk di beberapa negara Afrika seperti Sudan, Somalia, dan Kenya, mengenaskan. Jauh sebelumnya, di Kongo, Rwanda, Nigeria, pertikaian etnis atau suku lebih kental telah dibandingkan dengan kesenjangan sosial ekonomi¹.

Afrika masih bergejolak hingga kini. Afrika benar-benar negeri yang tak pernah sepi dari derita keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Ia mengulang kembali asal muasal konflik karena ketidakadilan, masih bercokolnya penguasa tiran dan korup serta rakyatnya yang belum sepenuhnya merengkuh nikmat kemerdekaan. Afrika memang negeri yang tak pernah sepi dari derita konflik etnik dan perang antarsuku. Somalia, bagian dari derita itu. Negara bagian Afrika timur itu kondisinya kini kian hari kian memprihatinkan.

¹ http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=9282&coid=3&caid=31.html

Berbagai konflik masih sering terjadi di negara tersebut. Negara miskin yang penuh derita, bertahun – tahun seakan tidak ada habis – habisnya dirundung masalah. Mulai dari kelaparan hingga perang saudara. Terlebih lagi pengakuan kedaulatan yang diberikan oleh negara - negara internasional seakan tidak mampu membawa negara ini menuju kesejahteraan.

Konflik yang terus berkecamuk di kawasan Afrika ini menimbulkan simpati dari dunia internasional. Tidak sedikit negara – negara dunia ikut berpartisipasi membantu mengatasi konflik yang ada. Organisasi Internasional PBB dengan Dewan Keamanannya, seakan tiada henti – hentinya ikut membantu mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pemerintahan Somalia. Pemerintahan transisional Somalia pasca pemilu 2004 ini tidak menunjukkan indikasi yang lebih baik terhadap stabilitas politik dalam negeri Somalia. Stabilitas politik dalam negeri Somalia masih kerap dipengaruhi oleh negara lain, seperti Amerika Serikat dan Etiopia. Konflik yang terjadi pada negara Somalia lebih disebabkan campur tangan pemerintah Etiopia dan Amerika Serikat yang tidak setuju Islam berkembang pesat di negara tersebut.

Terlebih lagi, dukungan dari pemerintah Amerika Serikat yang menilai bahwa adanya kelompok Islam garis keras, seperti Al Qaeda yang mulai berkembang di negara tersebut. Dengan alasan memerangi terorisme², Amerika Serikat bertujuan untuk menjadikan negara Somalia menjadi negara jajahan, seperti halnya negara Irak. Perang yang terjadi di Mogadishu, ibukota negara Somalia itu kini menjadi satu pertanyaan,..

² Harun Yahya. *Terorisme ritual setan*, PT. Senayan Abadi, 2003. Jakarta

Akankah rakyat Somalia akan menikmati kesejahteraan? Terlebih lagi, campur tangan Amerika Serikat di benua Afrika ini makin memperkeruh keadaan. Tidak dipungkiri selama ini, pemerintah Amerika Serikat dikenal sebagai negara *super power* yang selalu turut campur dalam berbagai persoalan dalam negeri berbagai negara lain sebagai polisi dunia. Telah banyak sejarah yang menunjukkan intervensi Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan paparan diatas, dalam kesempatan kali ini, penulis akan mengupas permasalahan konflik somalia dengan mengajukan judul : “Konflik pada Pemerintahan Transisional Somalia 2006-2007”.

B. TUJUAN PENULISAN

1. Memberikan penjelasan (Eksplanasi) tentang politik dalam negeri selama periode pemerintahan transisional Somalia.
2. Memberikan penjelasan (eksplanasi) tentang konflik yang berkecamuk pada kurun waktu terakhir (tahun 2006-2007).
3. Mengemukakan, menganalisa dan menjelaskan motivasi dari kepentingan politik Luar Negeri Amerika Serikat di kawasan Afrika, terutama Negara Somalia pada khususnya.
4. Menerapkan teori – teori ilmu Hubungan Internasional pada kasus – kasus actual sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional yang di pelajari selama perkuliahan.

5. Menambah wawasan dan Pengetahuan penulis tentang konflik - konflik di sebuah negara dan mengetahui apa saja yang menjadi penyebabnya.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Somalia adalah negara yang rawan akan konflik. Sejak jatuhnya pemerintahan militer di bawah diktator Mohammed Siad Barre, negara somalia menjadi negara yang tidak aman. Berbagai konflik terus mendera negara ini. Mulai dari kelaparan hingga perang saudara. Sejak tahun 1991, Somalia merupakan negara yang sering sekali terjadi perang saudara. Perang yang bermula dari meluapnya kemarahan rakyat kepada pemerintahan Mohammed Siad Barre kala itu, ternyata terus berlanjut hingga 15 tahun lamanya. Perang saudara tersebut mengakibatkan terpecahnya beberapa wilayah Somalia, dan berdirinya dua blok politik yang berseberangan antara satu dengan lainnya. Yang pertama bernama Somaliland dan yang kedua bernama Puntland. Keduanya saling mengklaim sebagai negara yang sah dan berdaulat. Tidak hanya itu, sebagian wilayah Somalia lainnya pun terpecah menjadi beberapa bagian dalam klan-klan Somalia.

Sebelum pemerintahan transisi dukungan dari PBB, sebagian wilayah Somalia dikuasai oleh Mahakim Islamiyah, dan sebagian lagi dikuasai para panglima perang dukungan Amerika Serikat yang pro terhadap pembentukan pemerintahan transisi. Pemerintahan Somalia awalnya memang tidak diakui oleh dunia internasional.

Pemerintahan Somalia yang diakui dunia internasional adalah "Pemerintahan Transisi Nasional", dikepalai oleh Abdul Kassim Salat Hassan yang kemudian, diganti dengan Abdullah Yusuf pada parlemen transisional Somalia ditahun 2004³. Kendati legalitas pemerintahan Abdullah Yusuf diakui oleh masyarakat internasional, akan tetapi ia tidak mengantongi otoritas aktual dalam pemerintahannya. Artinya banyak kebijakan dan keputusan strategis negara yang didikte dan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

Adanya campur tangan Amerika Serikat & Etiopia turut mempengaruhi stabilitas pemerintahan Abdullah Yusuf. Para diplomat dan pengamat barat memperingatkan bahwa kebijakan Amerika Serikat di Semenanjung Afrika, memungkinkan untuk mendorong terjadinya konflik di Mogadishu.

Namun ternyata perbedaan pandangan terhadap system pemerintahan negara kemudian memicu timbulnya konflik antara *Uni Islamic Court* (UIC) dengan pemerintahan transisional pimpinan Abdullah Yusuf. *Uni Islamic Court* / Uni Mahkamah Islam menginginkan Somalia menjadi negara yang berlandaskan pada Syariat Islam. Uni Mahkamah Islam tidak sependapat dengan kebijakan presiden Abdullah Yusuf yang dinilai banyak dipengaruhi oleh negara lain.

Konflik akhirnya terjadi di Mogadishu. Aksi penentangan UIC terhadap pemerintah transisi menyebabkan perang yang berkepanjangan. Pertempuran sengit terjadi antara Milisi Islam gabungan UIC melawan tentara pemerintahan transisi terjadi pada pertengahan februari 2006.

³ Abdullah Yusuf memenangkan 189 dari 275 suara dalam pemilu tahun 2004. (sumber; <http://www.wikipedia.org/somalia.html>).

Dari pertempuran tersebut, sedikitnya 70 orang korban meninggal dunia, serta ratusan orang lainnya luka – luka⁴. Dominasi kelompok Islam pun kian kuat. Pemerintahan transisi tidak berdaya menghadapi gempuran para Milisi Islam. Dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat, pemerintahan transisi pimpinan Abdullah Yusuf, kemudian bersatu membentuk ARPC (*Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism* / pasukan gabungan pemulihan perdamaian anti terorisme).

Pertempuran sengit kembali terjadi pada bulan Juni 2006. Dimana sedikitnya 350 rakyat somalia meninggal dunia. Konflik kian memanas ketika Uni Mahkamah Islam berhasil menguasai sebagian besar kota Mogadishu, dan wilayah sekitarnya. Dari kemenangan tersebut, pimpinan Uni Mahakim Islamiyah, Sheikh Syarif Ahmed memerintahkan untuk memerangi segala musuh islam serta memerintahkan kepada Amerika agar menarik pasukannya dari kota Mogadishu.

Pertempuran sengit kembali terjadi pada akhir tahun 2006. Dimana sedikitnya 500 rakyat sipil meninggal dunia⁵. Konflik kian memanas ketika Uni Mahkamah Islam berhasil menguasai sebagian besar kota Mogadishu, serta wilayah sekitarnya. Dari kemenangan tersebut, pimpinan Uni Mahakim Islamiyah, Sheikh Syarif Ahmed memerintahkan untuk memerangi segala musuh islam serta memerintahkan kepada Amerika Serikat agar menarik pasukannya dari kota Mogadishu. Disepanjang tahun 2006, lebih dari 700 orang rakyat sipil meninggal dunia, akibat aksi perlawanan yang dilakukan oleh Uni Mahkamah Islam Somalia

⁴ <http://www.antara.co.id/arc/2007/4/22/perang-di-mogadishu-meluas-ratusan-orang-tewas/>

⁵ [Http://www.wikipedia.com/perang_Mogadishu_2006.Html](http://www.wikipedia.com/perang_Mogadishu_2006.Html).

Amerika Serikat mensinyalir adanya sindikat terorisme yang berlandung di Uni Mahkamah Islam Somalia. Amerika Serikat kemudian meminta dukungan kepada Pemerintah Ethiopia untuk mendukung pada pemerintahan transisi Abdullah Yusuf.

Pertempuran berlanjut pada bulan Maret hingga April tahun 2007. Dimana sedikitnya 1.200 rakyat Somalia tewas, 4.600 orang lainnya luka – luka akibat pertempuran tersebut. Dari kubu pemerintah transisi sendiri dilaporkan⁶, sedikitnya 55 tentara Amerika & 85 tentara Ethiopia meninggal dunia, serta ratusan orang lainnya luka – luka akibat perang tersebut. Hingga akhir tahun 2007, konflik yang terjadi di Mogadishu masih belum dapat dihentikan hingga saat ini.

Konflik senjata yang terjadi di Somalia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (tahun 2006 hingga tahun 2007) menelan korban hingga 14 ribu jiwa⁷. Bukan hanya itu, bahkan sekitar 19. 270 ribu orang lainnya terluka dan sekitar satu setengah juta rakyat Somalia hidup terlunta-lunta di belantara hutan dan pemukiman pengungsian yang tak menentu.

D. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan pada latar belakang yang ada diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :**“Mengapa pada pemerintahan sementara (pemerintahan transisional) di Somalia sering terjadi konflik?”**

⁶ [Http://www.wikipedia.com/perang Mogadishu 2006](http://www.wikipedia.com/perang Mogadishu 2006) (diakses 06 November 2008)

⁷ <http://www.erasuslim.com/konflik somalia 2007.html>.

E. KERANGKA TEORI

Untuk menganalisa permasalahan yang muncul dari sebuah fenomena sosial yang dikaji, termasuk didalamnya permasalahan yang muncul dalam hubungan internasional dibutuhkan sebuah analisa yang bernama "teori" yang merupakan penjelasan umum "mengapa"sesuatu terjadi.

Dengan kata lain Teori dapat digunakan sebagai alat eksplanasi, disamping itu membantu melakukan prediksi.⁸ Teori sebagai suatu perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu yang mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang dapat diamati.⁹

1. Teori Konflik

Secara umum yang dimaksud dengan konflik adalah pertentangan atau percekocokan¹⁰. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya¹¹.

⁸ Mas'ood,Mochtar *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Lp3ES. Jakarta. 1991. hal. 217.

⁹ J. Meleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hal. 61.

¹⁰J.S Poerwadarmanta,W, Kamus Umum Berbahasa Indonesia, Balai Pustaka.Jakarta.1991.

¹¹ [Http://www.wikipedia.com/Konflik.html](http://www.wikipedia.com/Konflik.html) (diakses pada 13 Oktober 2008)

Konflik menurut Johan Galtung adalah “Usaha mencapai tujuan yang berbeda oleh beberapa kelompok”. Teori segitiga ABC dan pendekatan transeden yang dibangun oleh Johan Galtung menyatakan bahwa ada tiga unsur utama terjadinya konflik, yaitu :

- a. Sikap “Attitude”, kedua pihak harus memiliki sikap yang bertentangan satu sama lain untuk mencapai tujuan masing – masing.
- b. Perilaku “Behavior” , kedua belah pihak harus bertindak sebagai pihak yang berkonflik. Perilaku merupakan bentuk aksi dari sikap mental seseorang dalam merespon sesuatu.
- c. Pertentangan “Contradiction”, adalah pertentangan yang tajam antara dua hal. Harus ada pertentangan antara kepentingan dan tujuan dari kedua belah pihak setidaknya tujuan dan kepentingan masing – masing pihak harus tercapai sehingga terbentuk kontradiksi.

Ada beberapa faktor yang bisa kita analisa sebagai penyebab atau paling tidak bisa memicu terjadinya suatu konflik :

Faktor pertama adalah karena ambisi untuk menunjukkan eksistensi dan pamer kekuatan (*power showing*). Woodrow Wilson berpendapat pada saat perang dunia pertama, bahwa perang yang dilakukan bertujuan untuk mengakhiri semua peperangan (*war to end all wars*). Namun, George W. Bush mengatakan bahwa perang melawan terorisme adalah perang untuk menghapuskan kejahatan (*wipe out evil*)¹².

¹² [http:// www.Romisatriawahono.net/konflik dunia,perang dan gap sosial.html](http://www.Romisatriawahono.net/konflik_dunia,perang_dan_gap_sosial.html)

Pada hakekatnya semua ingin mengakselerasi eksistensi diri dan identitas politik (*identity politics*) di mata dunia internasional. Kemudian mengklaim bahwa tindakan (negara) mereka sendirilah yang benar. Faktor ini juga termasuk faktor penting penyebab konflik politik (revolusi, kudeta) ataupun fenomena *ethnic cleansing* dan *genocide* yang beberapa dekade ini cukup marak di dunia¹³.

Faktor kedua, adalah faktor kemiskinan, ketidakadilan dan gap sosial yang terlalu besar. Anthony Georgieff berargumentasi bahwa pada era di atas tahun 1990, lebih dari 80% konflik dan peperangan di dunia disebabkan karena faktor kemiskinan dan krisis perekonomian. Negara miskin lebih besar memiliki peluang konflik dibandingkan dengan negara kaya (dengan perbandingan 3 banding 1). Menurut sekjen PBB Kofi Annan, salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah adanya ketidakadilan dan gap sosial-ekonomi yang cukup besar¹⁴.

Dalam konflik Pemerintahan Transisional Somalia, kelompok Islam Somalia (Uni Mahakim Islamiyah) kecewa dengan sikap pemerintahan Abdullah Yussuf. Sejak awal mereka tidak sependapat dengan kebijakan Pemerintah yang dinilai banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Ethiopia. Uni Mahakim Islamiyah ingin menunjukkan Eksistensi mereka. UIC ingin merubah Somalia menjadi negara islam dan menghendaki Somalia mengenakan hukum syariah.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Somalia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Dan mereka berhak untuk menerapkan kebijakan tersebut kepada pemerintahan transisi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Abdullah Yusuf dinilai tidak sesuai dengan harapan sebagian rakyat Somalia selama ini. Pemerintah transisional Somalia justru lebih banyak diintervensi oleh negara lain.

Berdasarkan dari argument tersebut diatas, maka dapat diambil suatu teori yang terkait dalam melakukan penelitian, yaitu :

2. Teori Intervensi

Intervensi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak asing terhadap urusan domestik suatu negara dan memberikan dampak terhadap negara tersebut¹⁵. Dampak yang terjadi bisa berbentuk perubahan situasi politik, opini publik, dikeluarkannya kebijakan baru, bahkan sampai tumbangannya rezim yang sedang berkuasa.

Pada hakikatnya intervensi merupakan representasi dari pembentukan aturan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah daripada aturan hukum. Bagi aktor yang kuat maka dia yang berkuasa lebih dari hukum yang telah disepakati. Akibatnya dapat mengancam keharmonisan dalam hubungan masyarakat internasional.

¹⁵ Joseph S. Nye, "Understanding International Conflict. An introduction to Theory and History" Howard University, Longman Inc., 1997, Hal. 134.

Intervensi yang dilakukan oleh *super power* memiliki tiga model, antara lain yaitu :

1. Diundang oleh Penguasa.

Penguasa mengundang pihak asing dengan tujuan menjaga wilayahnya dari tekanan negara lain untuk mempressure kekuatan pemberontak di dalam negeri. Biasanya ini dilakukan oleh negara yang kekuatan nasionalnya lemah.

2. Diundang oleh kelompok oposisi.

Keberlangsungan hidup sebuah negara hanya dapat dengan dukungan dari semua kelompok dalam batas wilayah mereka. Masing – masing kelompok dalam masyarakat ini memiliki standarisasi tertentu atas kondisi yang dirasakan dalam negara tersebut. Jika ada kelompok yang tidak terpenuhi aspirasinya seringkali berujung pada perpecahan social. Perpecahan social yang dalam dan beberapa kelompok dalam masyarakat merasa tertindas dapat menyebabkan kekacauan sipil.

Ketika terjadi perpecahan social, kelompok – kelompok sosial untuk mencapai strategi yang efektif, membutuhkan tindakan politik yang diorganisasi dengan baik bahkan sangat keras. Kecenderungannya mereka akan menggunakan dukungan dari luar. Dari pihak asing mereka akan memperoleh dana, propaganda, latihan, persenjataan, dan jaringan diplomasi di wilayah internasional dengan janji pemberian imbalan ketika mereka telah mencapai kekuasaan. Semakin erat hubungan ini dimungkinkan akan meningkatkan kepentingan – kepentingan dalam negeri.

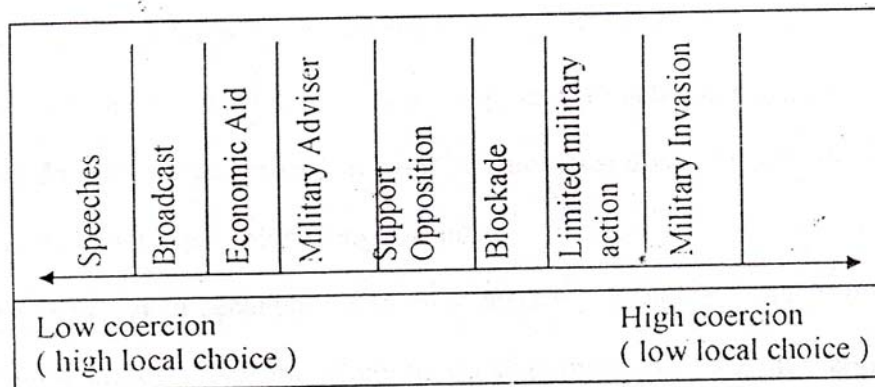
3. Memiliki agenda tertentu.

Menurut pelaku intervensi, tindakan melakukan intervensi merupakan simbiosis mutualisme. Dalam masa modern seperti sekarang ini, motif utama yang mendasari sebuah negara superpower melakukan intervensi yaitu untuk menjamin kelangsungan pemerintahan suatu negara yang bersahabat dalam lingkup wilayah pengaruhnya (*Sphere of influence*). Pelaku intervensi sudah dapat dipastikan berasal dari negara besar. Dikarenakan untuk memberikan dukungan terhadap kelompok tertentu sudah dipastikan akan membutuhkan dana, teknologi, jaringan, bahkan kekuatan militer yang sangat besar.

Penyokong dapat melakukan intervensi atas nama kelompok ataupun fraksi. Setelah memperoleh kekuasaan maka akan menggunakan pengaruhnya bersama kelompok untuk menjamin kepentingan luar negerinya. Dan pada kenyataannya sekarang ini, setiap golongan politik yang tidak stabil di suatu negara akan membuka peluang intervensi dari luar.

Oleh karena itu, kita dapat mengemukakan sebuah hipotesis bahwasannya semakin besar konflik kesukuan, keagamaan, ekonomi maupun ideologi dalam suatu masyarakat, maka akan semakin besar pula kemungkinan peluang suatu pemerintahan luar akan melakukan intervensi yang bertujuan untuk meraih kepentingannya dalam negara tersebut.

Tingkatan intervensi



Sumber : Joseph S.Nye,"*Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History*",Howard University, Longman Inc.1997,hal 34.

Pertama, pidato yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di negara asing untuk mempengaruhi politik domestic suatu negara. Pidato kenegaraan mengenai permasalahan di negara lain biasanya bersifat sangat politis karena menunjukkan bentuk hubungan antara kedua negara. Faktor – faktor kepentingan dalam negeri serta posisi actor dalam hubungan internasional berpengaruh sangat besar terhadap pidato tersebut.

Kedua, melalui penyiaran. Yaitu dengan adanya program pembentukan opini publik melalui berita – berita di media massa, baik televise, Koran, majalah, radio, maupun media seperti internet. *Ketiga*, bantuan ekonomi, merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi urusan domestik negara lain. *Keempat*, penyediaan para penasehat militer. *Kelima*, intervensi dengan

mendukung kelompok oposisi. *Keenam*, Blokade. *Ketujuh*, aksi militer terbatas. *Kedelapan*. Okupasi atau invasi militer secara menyeluruh.

Negara *super power* dalam melakukan intervensi akan membentuk karakteristik – karakteristik yang terpola dan terpadu, antara lain:

1. ketimpangan (*Asimetris*) kekuasaan yang besar terjadi antara negara super power dan negara yang menjadi sasaran. Intervensi dianggap sebuah jalan pintas untuk mencapai solusi dengan mudah.
2. *Super power* akan senantiasa mengajak negara - negara sekutunya untuk berbagi kekuasaan. Negara sekutu merupakan mitra yang sangat mengerti akan asas dan tujuan sehingga selalu melindungi semua aksinya dibalik sebuah legitimasi kolektif. Sehingga seolah – olah aksi ini telah disepakati dan atas nama sebuah organisasi internasional.
3. Untuk meminimalisir kemungkinan stigma atau pemikiran yang buruk akibat intervensi, negara *super power* menerapkan metode okupasi, yaitu cepat masuk dan cepat keluar. Sehingga mereka tidak akan tinggal lama di negara korban lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan.
4. Motif intervensi adalah untuk menempatkan kelompok yang disukai untuk memimpin pemerintahan dan menopang kelangsungan kekuasaan tersebut.

Dalam “*just and Unjust War*”, Michael Walzeer¹⁶ menyatakan bahwa ada empat situasi dimana perang atau intervensi militer secara moral dibenarkan, yaitu:

1. Tindakan intervensi yang bertujuan untuk mencegah sesuatu hal yang buruk (*pre-emptive intervention*).
2. Tindakan intervensi dilakukan untuk mengimbangi tindakan intervensi yang sebelumnya terjadi.
3. Intervensi yang bertujuan untuk menyelamatkan orang – orang yang terancam terbunuh dalam pembantaian missal / *geboside (Humanitarian Intervention)*.
4. Kewajiban untuk membantu gerakan pemisahan diri ketika kelompok oposisi mampu menunjukkan identitas dan karakternya yang *representative*. Adanya kelompok oposisi dalam suatu negara yang telah secara jelas menginginkan untuk memisahkan diri adri kedaulatan negara. Maka intervensi dibenarkan karena akan membantu mereka untuk memperoleh hak dan membentuk otonomi yang mandiri sebagai sebuah negara.

Amerika Serikat sebagai sebuah negara adikuasa sejak lama menerapkan intervensi seperti yang diungkapkan diatas. Sejarah panjang Amerika Serikat tidak terlepas dalam mencampuri berbagai urusan domestik negara lain.

¹⁶ Dikutip dari Ambar , Retnosih W. *Low Coencion choise Amerika Serikat dalam konflik di sudan*. UMY.2005. Yogyakarta.

Tindakan ini juga yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Somalia yang telah lama mengalami krisis akibat konflik internal. Bentuk – bentuk intervensi yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat telah mencapai tingkatan intervensi. Langkah tersebut dilakukan melalui pengeluaran pernyataan oleh pejabat tinggi, pembentukan opini melalui media massa, bahkan sampai dengan mendukung pemerintahan transisional pimpinan Abdullah Yusuf. Amerika Serikat masih terus melaksanakan aktivitas diplomasi untuk membantu pemerintah Somalia antara lain proses negosiasi perdamaian antara Pemerintah Federal Transisional dengan *Uni Mahkamah Islam* Somalia, untuk meredam konflik yang terjadi di Mogadishu.

Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan dukungannya sejak pembentukan pemerintah federal sementara Somalia dukungan PBB. Pemerintah pimpinan Abdullah Yusuf tersebut ingin meredam berbagai konflik internal yang kerap terjadi di Somalia, pada kurun waktu 1 tahun terakhir (tahun 2006 – 2007).

F. HIPOTESA

Dengan berdasar pada latar belakang permasalahan diatas dapat ditarik hipotesa, bahwa yang menyebabkan Konflik yang terjadi dalam pemerintahan sementara (pemerintahan transisional) Somalia disebabkan karena:

1. Terjadinya pertentangan sikap, perilaku serta perbedaan ideologi Uni Mahkamah Islam (UIC) Somalia dengan Pemerintahan Transisional pimpinan Abdullah Yusuf.
2. Adanya intervensi Etiopia dan Amerika Serikat di Somalia

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik Library Research atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah, majalah, surat kabar, internet maupun dokumen-dokumen lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan metode Argumentatif.

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan apa yang diungkapkan, serta data-data kepustakaan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan dianalisis secara Kualitatif, yaitu dari sekian banyak data yang terkumpul akan diseleksi dan dipilih yang paling berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran masalah tersebut disertai pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada serta relevansinya terhadap data yang ada.

H. JANGKAUAN PENELITIAN.

Mengingat luasnya permasalahan yang ada dalam ruang lingkup penelitian, maka agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terdapat dalam penelitian, maka perlu kiranya melakukan pembatasan masalah agar pembahasan lebih efisien dan efektif.

Maka penulis membatasi penelitian dimulai pada pemerintahan transisi somalia tahun 2006 yang sampai dengan akhir 2007.

I. SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab dan sistematikanya diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, ruang lingkup permasalahan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas Dinamika Politik Negara Somalia, seluk beluk pemerintahan dalam negeri Somalia, konflik – konflik internal, sejarah dan pemerintahan transisional Somalia.

BAB III : Konflik pada pemerintahan transisional Somalia, munculnya Uni Islamic Court, serta perang Mogadishu disepanjang pemerintahan presiden Abdullah Yusuf.

BAB IV : Bab ini membahas intervensi Amerika Serikat dan Etiopia di Somalia, Alasan intervensi Amerika Serikat di Somalia, kepentingan Amerika Serikat dan kepentingan Etiopia di Somalia.

BAB V : KESIMPULAN